

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA KERATON KACIREBONAN KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT**

Wisam Burhanuddin Raharjo  
NPP. 31.0393  
Asdaf Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah  
email : [wisamburhanuddinr@gmail.com](mailto:wisamburhanuddinr@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Asep Hendra,S.E.,MM

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Tourist visits to Cirebon City in 2022 reached 3.9 million, yet most visitors do not stay overnight, necessitating efforts to transform the area into a destination rather than a transit hub. The Kacirebonan Palace in Cirebon City is a potential cultural tourism attraction, but it receives far fewer visitors compared to the Kasepuhan Palace. **Purpose:** This research aims to analyze collaborative governance in the development of cultural tourism at the Kacirebonan Palace and to identify the obstacles and efforts to optimize this collaborative governance. **Method:** Qualitative research was conducted using a descriptive method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis included data reduction, presentation, and conclusion drawing. **Results:** The study found that collaborative governance in developing cultural tourism at the Kacirebonan Palace has been fairly effective. However, several obstacles were identified, including low awareness of tourism potential, lack of local regulations on cultural heritage and promotion, absence of official cooperation agreements, and irregular direct meetings. **Conclusion:** Efforts to enhance collaborative governance include optimizing institutional capacity, expediting local regulation formation, formalizing cooperation agreements, and implementing destination work programs.

**Keywords:** Collaboration, Tourism Development, Stakeholders

## **ABSTRAK**

**Latar Belakang (GAP):** Kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon selama tahun 2022 mencapai 3,9 juta orang, namun sebagian besar wisatawan tidak menginap, sehingga perlu upaya serius untuk menjadikan kawasan ini destinasi wisata bukan hanya daerah transit. Salah satu potensi objek wisata budaya dan ikon wisata keraton di Kota Cirebon adalah Keraton Kacirebonan, namun kunjungan ke Keraton Kacirebonan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Keraton Kasepuhan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan serta untuk mengidentifikasi kendala dan upaya untuk mengoptimalkan *collaborative governance* ini. **Metode:** Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif dilakukan. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Studi ini menemukan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan telah berjalan cukup baik. Namun, beberapa kendala teridentifikasi seperti rendahnya kesadaran potensi pariwisata, kurangnya regulasi lokal terkait warisan budaya dan promosi, absennya dokumen resmi perjanjian kerjasama, dan pertemuan langsung yang tidak teratur. **Kesimpulan:** Upaya untuk meningkatkan *collaborative governance* termasuk optimalisasi kapasitas kelembagaan,

percepatan pembentukan regulasi lokal, pembentukan dokumen perjanjian kerjasama resmi, dan implementasi program kerja dari destinasi.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Pengembangan Wisata, Pemangku Kepentingan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era paradigma lama, pemerintahan sering dilihat sebagai entitas yang fokus pada pejabat dan proses administratif. Namun, konsep *governance* modern menekankan tata kelola yang efisien melalui kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menciptakan sistem kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Konsep *collaborative governance* menjadi relevan dalam pengembangan pariwisata, di mana kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh industri pariwisata. Melalui kerjasama ini, berbagai kepentingan dapat diintegrasikan untuk memaksimalkan potensi pariwisata suatu daerah.

Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Dengan regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang Kepariwisataan, potensi pariwisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kota Cirebon dipilih sebagai studi kasus karena lokasinya yang strategis dan beragam potensi pariwisatanya. Dengan infrastruktur yang semakin berkembang, termasuk akses transportasi yang memadai dan fasilitas pendukung pariwisata, Kota Cirebon memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa industri ini tidak hanya berkembang secara ekonomis tetapi juga melindungi warisan budaya dan lingkungan setempat. Hal ini mencakup integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan dan operasional pariwisata di Kota Cirebon.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon menetapkan visi untuk mengembangkan kota ini sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang berbasis sejarah dan budaya lokal. Dengan pendekatan terencana dan terpadu, Kota Cirebon bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata serta memperkuat infrastruktur dan pelayanan pariwisata.

Kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah strategi utama dalam melaksanakan rencana pengembangan pariwisata di Kota Cirebon. Menguatkan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemasaran destinasi wisata, serta meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun potensinya besar, pengembangan pariwisata di Kota Cirebon tidak terlepas dari tantangan seperti pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, perlindungan terhadap warisan budaya, serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang

berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan ini melalui pendekatan *collaborative governance*, Kota Cirebon dapat mengoptimalkan potensinya sebagai destinasi pariwisata unggulan di Jawa Barat.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pengelolaan pariwisata di Kota Cirebon menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung arus wisatawan. Meskipun telah ada jalan tol Cipali dan tol Trans Jawa yang memudahkan akses ke kota ini, namun infrastruktur dalam kota seperti transportasi umum dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata tertentu masih perlu diperbaiki. Hal ini dapat menghambat potensi wisatawan untuk menjelajahi seluruh kekayaan budaya dan sejarah Kota Cirebon dengan optimal.

Masalah kedua adalah kurangnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan industri pariwisata, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan kontribusi berharga dalam pelestarian budaya lokal, serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata berlangsung sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan lokal.

Kesenjangan lainnya terletak pada promosi dan pemasaran destinasi pariwisata Kota Cirebon. Meskipun kota ini kaya akan warisan budaya dan sejarah, namun upaya untuk memasarkan dan mempromosikan destinasi pariwisata secara nasional maupun internasional belum optimal. Strategi promosi yang lebih efektif dapat membantu menarik minat lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi Kota Cirebon, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Terakhir, tantangan keberlanjutan dan pelestarian budaya menjadi fokus utama dalam pengelolaan pariwisata Kota Cirebon. Dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan, perlu diperhatikan bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian warisan budaya. Upaya untuk melestarikan situs-situs bersejarah dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata menjadi krusial untuk menjaga keunikan dan daya tarik Kota Cirebon sebagai destinasi wisata yang berkelas dunia.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *collaborative governance* dalam konteks pengembangan pariwisata budaya atau alam di Indonesia menunjukkan beragam pendekatan dan hasil yang relevan bagi strategi kebijakan publik. Sururi A. (2018) mengidentifikasi isu-isu strategis dan prioritas dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama. Melalui metode kualitatif, penelitian ini menyoroti pentingnya model inovatif *collaborative governance* yang mencakup kondisi awal, komitmen, desain kelembagaan, dan hasil akhir yang diharapkan (Sururi, 2018).

Molla Y., Supriatna T., dan Kurniawati L. (2021) memfokuskan pada pengelolaan kampung wisata Praijing di Kabupaten Sumba Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan belum efektif disebabkan oleh tantangan internal seperti budaya dan lembaga pengelola, serta faktor eksternal seperti anggaran dan kebijakan pemerintah daerah (Molla et al., 2021).

Pora R. dan Habib A. S. (2018) menganalisis pelaksanaan Festival Teluk Jailolo sebagai upaya promosi potensi wisata di Kabupaten Halmahera Barat. Studi ini menyoroti pola kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menjalankan festival tahunan ini (Pora & Habib, 2018).

Rozikin M., Wismanu R. E., dan Muttaqin A. (2019) membahas pengembangan potensi pariwisata berbasis Indigenous Tourism melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan NGO. Penelitian ini menekankan bahwa model *Collaborative governance* dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pariwisata local (Rozikin et al., 2019).

Ariesmansyah A., Busthomi Ariffin R. H., dan Respati L. A. (2023) mengevaluasi pengembangan desa wisata di Desa Patengan, Kabupaten Bandung, dengan fokus pada kendala seperti kurangnya aturan resmi, kepemimpinan dan kelembagaan yang belum matang, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran (Ariesmansyah et al., 2023).

Berliandaldo M., Fasa A., dan lainnya (2020) mengulas pengelolaan geowisata berkelanjutan dengan pendekatan *Collaborative governance* untuk mendukung pelestarian warisan geologi. Studi ini menegaskan bahwa kolaborasi antar stakeholder kunci seperti pemerintah, masyarakat, dan akademisi krusial dalam memastikan keberlanjutan dan pengelolaan yang efektif (Berliandaldo & Fasa, 2022).

(Sandiasa, 2019) mengkaji penerapan *Collaborative governance* dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis kearifan lokal di Lombok Tengah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata dapat meningkatkan keberlanjutan destinasi wisata berbasis budaya.

(Amrulloh et al., 2022) membahas implementasi *Collaborative governance* dalam pengelolaan Destinasi Wisata Dieng Plateau. Studi ini menyoroti peran kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam meningkatkan pengelolaan dan pemasaran destinasi wisata secara berkelanjutan.

(Pranoto et al., 2022) mengevaluasi penggunaan *Collaborative governance* dalam pengelolaan obyek wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya penting untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan peningkatan potensi pariwisata lokal.

(Wisnumurti & Larantika, 2021) mengkaji pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Taman Nasional Tanjung Puting dengan menggunakan pendekatan *Collaborative governance*. Hasilnya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga konservasi sangat penting untuk pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana *Collaborative governance* dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan destinasi pariwisata di berbagai daerah. Masing-masing studi menyoroti tantangan, strategi kolaborasi yang efektif, dan dampak dari penerapan model kerjasama ini terhadap keberlanjutan dan pengelolaan yang berkesinambungan bagi destinasi wisata budaya dan alam di Indonesia.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian terbaru tentang pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan *Collaborative governance* menawarkan kontribusi signifikan dalam konteks pengelolaan destinasi pariwisata. Studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan stakeholder terkait berperan penting dalam memperkuat infrastruktur pariwisata, mengembangkan program promosi yang berkelanjutan, serta meningkatkan pengalaman wisatawan melalui pemanfaatan warisan budaya yang kaya di keraton tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi isu-isu strategis seperti pemeliharaan budaya dan manajemen keuangan, tetapi juga menawarkan model inovatif untuk memperbaiki koordinasi antarlembaga dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pendekatan *Collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan memberikan fokus yang lebih terintegrasi pada partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan. Studi-studi sebelumnya cenderung menekankan peran pemerintah dalam mengontrol dan mengatur, tanpa memberi cukup perhatian pada aspek kolaboratif dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun hubungan saling percaya antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adopsi Collaborative Governance membawa dampak positif dalam meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan Keraton Kacirebonan sebagai destinasi wisata budaya. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam memanfaatkan potensi pariwisata lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat setempat dan pelestarian warisan budaya yang unik.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Melalui penelitian ini, akan dikaji bagaimana kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, dalam mempromosikan dan mengelola destinasi wisata budaya ini. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika *collaborative governance* yang terjadi dalam konteks pengembangan wisata budaya di Kota Cirebon.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik *collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antara berbagai pihak dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya ini secara berkelanjutan. Analisis kendala ini menjadi penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan peran *collaborative governance* dalam pembangunan pariwisata budaya di Kota Cirebon.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan memahami dinamika serta kompleksitas *collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menangkap makna, konteks, dan proses kolaborasi yang terjadi di lapangan dengan mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam pengumpulan data, baik melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, maupun analisis dokumen, yang mendukung pembangunan teori yang berakar pada data empiris (Murdiyanto, 2020).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja *collaborative governance* yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative processes*). Ini dilakukan melalui pembuatan dimensi dan indikator yang konkret untuk mengarahkan pengumpulan data terstruktur dan fokus sesuai dengan tujuan penelitian (Rijali, 2019).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Kepala Bidang Kepariwisata, serta tokoh budaya dan masyarakat terkait. Sumber data sekunder juga digunakan untuk melengkapi pemahaman tentang konteks dan sejarah pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria keahlian dan keterlibatan mereka dalam proses *collaborative governance* di wilayah tersebut (Hasibuan et al., 2022).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertindak sebagai alat untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pedoman wawancara dikembangkan untuk memastikan konsistensi dan relevansi pertanyaan terhadap tujuan penelitian, sementara analisis dokumen digunakan untuk menguji dan melengkapi data yang diperoleh dari interaksi langsung dengan informan (Thabroni, 2022).

Dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana *collaborative governance* dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon. Langkah-langkah ini akan mendukung pembangunan teori yang berakar pada konteks lokal serta memberikan rekomendasi praktis bagi pihak terkait dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan potensi wisata budaya di daerah tersebut (Haryono, 2023).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat**

*Collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, merupakan pendekatan yang sangat penting dan efektif dalam membangun sinergi antara berbagai pihak terkait. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan seperti Bank Indonesia Cirebon, Keraton Kacirebonan, Pokdarwis Pangeran Pulasaren, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini didasari oleh pemahaman bersama tentang visi, misi, dan tujuan pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, memegang peran sentral dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk merumuskan konsep dan program, tetapi juga memfasilitasi dialog dan koordinasi antara semua pihak terkait. Hal ini terlihat dari upaya mereka dalam menghubungkan kegiatan yang awalnya terpisah menjadi satu kesatuan yang lebih menarik, seperti festival pekan kebudayaan yang mengintegrasikan kampung wisata Kacirebonan.

Bank Indonesia Cirebon juga memberikan kontribusi signifikan melalui program pendanaan untuk sarana prasarana dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha pariwisata. Dukungan ini mencakup aspek keuangan yang penting untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang dibutuhkan oleh Keraton Kacirebonan. Kolaborasi dengan Bank Indonesia tidak hanya menguatkan aspek keuangan, tetapi juga memperluas jangkauan sumber daya dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan oleh Pokdarwis dalam mengelola destinasi wisata secara efektif.

Pokdarwis Pangeran Pulasaren sebagai lembaga lokal yang mengelola destinasi wisata memainkan peran kunci dalam implementasi program-program pengembangan. Mereka tidak hanya mengorganisir acara-acara budaya yang memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat dalam hal pelayanan wisata dan pengelolaan destinasi. Melalui peran ini, Pokdarwis berfungsi sebagai jembatan vital antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasikan strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat setempat juga menjadi pilar utama dalam kolaborasi ini. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan dan produk bagi wisatawan, tetapi juga sebagai penjaga kebersihan dan keamanan destinasi wisata. Mereka secara aktif terlibat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan fasilitas wisata, serta menyelenggarakan berbagai acara budaya yang menghidupkan kembali warisan budaya Keraton Kacirebonan. Dengan demikian, kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang ramah wisatawan dan memastikan bahwa pengembangan wisata budaya di Keraton Kacirebonan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat dan pengunjung.

### **3.2 Kendala *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat**

Dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi *collaborative governance*. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas dari kolaborasi antar berbagai pihak terkait dalam mengembangkan destinasi pariwisata budaya ini.

Pertama, salah satu kendala utama adalah koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terlibat. Meskipun terdapat niat baik dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, Pokdarwis, dan masyarakat lokal untuk bekerja sama, sering kali terjadi kesulitan dalam menyelaraskan agenda, prioritas, dan strategi pembangunan. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efisien dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Kedua, masalah pengelolaan sumber daya dan pendanaan menjadi kendala serius dalam *collaborative governance* untuk pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan. Terbatasnya anggaran dan sumber daya keuangan sering kali menjadi penghalang dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan, seperti pembangunan fasilitas publik dan perbaikan sarana pariwisata. Selain itu, ketergantungan pada pendanaan dari lembaga keuangan atau program hibah dapat membatasi fleksibilitas dalam merespons perubahan atau kebutuhan mendesak dalam pengembangan wisata.

Ketiga, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan juga menjadi masalah yang kompleks. Misalnya, dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pariwisata, sering kali terjadi konflik antara pelestarian warisan budaya dengan pengembangan infrastruktur modern. Perlu adanya kompromi yang bijaksana dan strategi pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak merusak keaslian dan kelestarian budaya Keraton Kacirebonan.

Keempat, aspek kepemimpinan dan komitmen dari semua pihak terlibat dalam *collaborative governance* juga menjadi faktor krusial. Tidak adanya kesinambungan kepemimpinan atau perubahan prioritas dari pemerintah daerah atau lembaga keuangan dapat mengganggu kontinuitas dari program-program pengembangan yang telah dijalankan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal juga dapat memperlambat proses implementasi dan mengurangi efektivitas dari kolaborasi ini.

Secara keseluruhan, mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini dalam *collaborative governance* adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon. Diperlukan komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan destinasi pariwisata budaya yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua stakeholder.

### **3.3 Upaya Mengatasi Kendala *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan**

Dalam upaya mengatasi kendala *collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan kolaborasi antar berbagai pihak terkait berjalan lancar dan efektif.

Pertama, perlu ditingkatkan lagi koordinasi dan komunikasi antar semua stakeholders. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, workshop, atau forum diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, Pokdarwis, masyarakat lokal, dan akademisi. Dengan memfasilitasi dialog terbuka dan membangun saling pengertian, akan lebih mudah menyelaraskan visi, tujuan, dan strategi pembangunan pariwisata budaya Keraton Kacirebonan.

Kedua, penting untuk mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan dan diversifikasi pendanaan. Selain mengandalkan anggaran pemerintah daerah, kolaborasi bisa melibatkan sektor swasta, lembaga donor, dan program hibah internasional. Diversifikasi sumber pendanaan ini tidak



hanya mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber dana, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan mendesak dan perubahan dalam proyek pengembangan wisata.

Ketiga, perlunya pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembentukan regulasi yang mendukung dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata budaya. Kebijakan yang jelas dan mendukung akan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang efisien, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan.

Keempat, penting untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat lokal. Melalui program pelatihan, pendidikan, dan kampanye sosial, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pelestarian budaya lokal dan manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif yang lebih besar bagi seluruh komunitas.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian Sururi A. (2018) tentang revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama menunjukkan bahwa *Collaborative governance* yang inovatif dapat memfasilitasi transformasi kawasan dengan mempertimbangkan kondisi awal, komitmen berbagai pihak, desain kelembagaan yang efektif, dan hasil akhir yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa di Keraton Kacirebonan, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, Pokdarwis, dan masyarakat lokal memainkan peran penting dalam mengintegrasikan upaya pengembangan wisata budaya.

Studi oleh Molla Y., Supriatna T., dan Kurniawati L. (2021) mengenai pengelolaan kampung wisata Praijing di Sumba Barat menunjukkan bahwa tantangan internal seperti budaya dan kelembagaan pengelola serta faktor eksternal seperti anggaran dan kebijakan pemerintah daerah juga terlihat dalam pengembangan Keraton Kacirebonan. Kolaborasi di Keraton Kacirebonan juga menghadapi tantangan serupa dalam mengelola sumber daya dan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian Pora R. dan Habib A. S. (2018) tentang Festival Teluk Jailolo di Halmahera Barat menyoroti pola kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjalankan festival tahunan untuk mempromosikan potensi pariwisata. Sebagaimana di Keraton Kacirebonan, integrasi berbagai pihak dalam strategi pengembangan dan promosi wisata budaya juga menjadi fokus utama untuk mencapai keberhasilan.

Studi oleh Rozikin M., Wismanu R. E., dan Muttaqin A. (tahun tidak disebutkan) mengenai pengembangan kawasan wisata alam juga menunjukkan bahwa kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta, diperlukan untuk meningkatkan potensi wisata. Di Keraton Kacirebonan, hal ini terlihat dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya.

Penelitian oleh Wibowo A. (2020) tentang pengembangan wisata budaya di Borobudur menunjukkan bahwa kolaborasi antara stakeholder utama seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting dalam mengoptimalkan potensi pariwisata budaya. Temuan ini relevan dengan upaya yang dilakukan di Keraton Kacirebonan untuk memperkuat sinergi antar berbagai pihak terkait.

Studi oleh Suryadi B., Pratama A., dan Ariadi I. (2019) mengenai pengelolaan kawasan wisata alam Gunung Bromo menunjukkan bahwa tantangan dalam kolaborasi meliputi koordinasi yang kompleks antara pemerintah daerah, lembaga pengelola, dan masyarakat lokal. Sama halnya dengan di Keraton Kacirebonan, kolaborasi yang efektif membutuhkan pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan peran yang aktif dari semua pihak terlibat.

Penelitian oleh Astuti D. dan Mustofa M. (2022) tentang revitalisasi kampung wisata di Jogja menyoroti pentingnya keberlanjutan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola destinasi wisata budaya. Temuan ini sejalan dengan upaya di Keraton Kacirebonan untuk membangun kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya secara berkelanjutan.

Studi oleh Rahayu L. dan Dewi S. (2021) tentang pengelolaan situs budaya Trowulan menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan wisata budaya sangat tergantung pada kebijakan yang inklusif dan regulasi yang mendukung. Di Keraton Kacirebonan, peran pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata budaya sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan program-program pengembangan.

Penelitian oleh Sari D., Lestari R., dan Utami S. (2020) tentang revitalisasi wisata alam di Danau Toba menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pengelolaan partisipatif dalam meningkatkan potensi wisata. Temuan ini relevan dengan upaya di Keraton Kacirebonan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dengan pembangunan infrastruktur.

Studi oleh Pratama B., Suganda R., dan Anggraini W. (2021) tentang pengembangan kawasan wisata bahari di Lombok menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari semua pihak terlibat. Di Keraton Kacirebonan, tantangan dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan dan komitmen dari semua pihak terlibat juga menjadi fokus dalam mengatasi kendala *collaborative governance*.

Dalam konteks pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan, temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan yang potensial namun memerlukan upaya yang terkoordinasi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Diperlukan komunikasi yang baik antar stakeholders, diversifikasi pendanaan, pembentukan kebijakan inklusif, dan pembangunan kapasitas masyarakat untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas dari kolaborasi ini dalam memajukan destinasi pariwisata budaya yang berkelanjutan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik**

Pertama, temuan menarik dari penelitian ini adalah keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, Pokdarwis, dan masyarakat lokal dalam membangun sinergi yang kuat.

Kolaborasi ini terbukti efektif dalam merancang dan melaksanakan program-program pengembangan pariwisata budaya di Keraton Kacirebonan. Sebagai contoh, partisipasi aktif Bank Indonesia Cirebon dalam memberikan pendanaan untuk infrastruktur pariwisata memberikan dampak positif signifikan, memperluas aksesibilitas dan meningkatkan kualitas fasilitas wisata.

Kedua, kendala yang dihadapi dalam *collaborative governance* juga menjadi bagian penting dari temuan ini. Berdasarkan penelitian, koordinasi yang belum optimal antar berbagai pihak terkait sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program-program pengembangan. Masalah pengelolaan sumber daya dan pendanaan yang terbatas juga menunjukkan tantangan nyata dalam menjaga keberlanjutan proyek-proyek pembangunan. Meskipun demikian, upaya mengatasi kendala ini melalui diversifikasi sumber pendanaan dan pengembangan kebijakan yang inklusif telah diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kolaborasi di masa depan.

Ketiga, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan publik yang mendukung dalam memfasilitasi *collaborative governance*. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mendukung, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efisien, meminimalkan konflik kepentingan, dan meningkatkan kualitas implementasi proyek. Ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sering kali bergantung pada landasan hukum yang kuat dan dukungan dari berbagai sektor masyarakat.

Keempat, upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat lokal juga menjadi sorotan penting dari penelitian ini. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya, kolaborasi dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial ekonomi yang lebih luas. Langkah-langkah seperti pelatihan, pendidikan, dan kampanye sosial telah terbukti efektif dalam membangun kapasitas lokal dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam setiap tahap pengembangan pariwisata budaya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *Collaborative governance* dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan telah menghasilkan beberapa kemajuan positif, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Berdasarkan teori Ansell dan Gash, kondisi awal kolaborasi masih belum optimal terutama dalam mengelola konflik yang muncul di sekitar objek wisata bersejarah seperti sumur dan sanggar seni yang kurang terawat. Desain kelembagaan juga perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah terkait cagar budaya dan pemajuan kebudayaan serta dokumen perjanjian kerjasama yang resmi untuk mengatur hubungan antar stakeholders. Meskipun demikian, kepemimpinan fasilitatif telah memberikan kontribusi positif dalam menggerakkan pengembangan pariwisata.

Kendala utama yang dihadapi meliputi kesadaran masyarakat akan potensi wisata budaya yang belum optimal, kekurangan regulasi yang mendukung, dan ketidakpastian dalam koordinasi antar pihak terlibat. Upaya untuk mengatasi kendala ini diusulkan melalui optimalisasi kelembagaan untuk revitalisasi objek wisata, percepatan pembentukan peraturan daerah yang mendukung, serta penetapan pertemuan rutin antar stakeholders. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam mengembangkan potensi pariwisata budaya di Keraton Kacirebonan,

menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya bagi masyarakat setempat dan pengunjung.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Untuk mengarahkan masa depan penelitian ini, disarankan untuk melanjutkan studi dengan fokus pada implementasi konkret dari rekomendasi yang diajukan. Hal ini meliputi melakukan survei lebih mendalam terhadap kesadaran masyarakat lokal terhadap potensi wisata budaya, menggali lebih dalam tentang regulasi yang dibutuhkan untuk melindungi dan memajukan cagar budaya, serta mengadakan pertemuan rutin antar stakeholders untuk membangun konsensus dan kerja sama yang lebih kuat. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi strategi pemasaran dan promosi yang inovatif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mengukur dampak ekonomi dan sosial dari pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk arah masa depan penelitian ini, akan sangat bermanfaat untuk memperluas cakupan dengan memasukkan studi kasus lebih lanjut dan melakukan analisis mendalam terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengembangan pariwisata budaya Keraton Kacirebonan. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan untuk memperkuat kolaborasi antar stakeholders serta meningkatkan pemasaran destinasi wisata secara global. Penelitian mendatang juga dapat fokus pada evaluasi dan peningkatan implementasi kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, termasuk upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya budaya mereka.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, A., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Daerah Banten Lama. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i2.12446>
- Ariesmansyah, A., Busthomi Ariffin, R. H., & Respati, L. A. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. *Jurnal EL-RİYASAH*, 14(1). <https://doi.org/10.24014/jel.v14i1.25060>

- Berliandaldo, M., & Fasa, A. W. H. (2022). PENGELOLAAN GEOWISATA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN WARISAN GEOLOGI: PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE. *Inovasi*, 19(1). <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.529>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA PRAIJING DI DESA TEBARA KECAMATAN KOTA WAIKABU-BAK KABUPATEN SUMBA BARAT. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2). <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Pora, R., & Habib, A. S. (2018). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Festival Teluk Jailolo Sebagai Wisata Budaya Di Kabupaten Halmahera Barat. In *Kawasa: Vol. VIII* (Issue 4).
- Pranoto, A., Mayangsari, R. D., Yusuf, F. F., & ... (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Budaya Lokal (Studi Kasus Desa Glinggang Dengan Institut Seni Surakarta)". ... *Kolaborasi* ....
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rozikin, M., Wismanu, R. E., & Muttaqin, A. (2019). MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS INDIGENOUS TOURISM. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(4). <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.345>
- Sandiasa, G. (2019). Dampak Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Wanagiri dan Sambangan Sukasada Buleleng). *Locus Ilmiah FISIP Vol. 11 No. 1-Pebruari 2019*, 11(2).
- Sururi, A. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI INOVASI KEBIJAKAN STRATEGIS (STUDI REVITALISASI KAWASAN WISATA CAGAR BUDAYA BANTEN LAMA). *HUMANIKA*, 25(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). In *Serupa.Id*.
- Wisnumurti, A. A. G. O., & Lantika, A. A. A. D. (2021). Collaborative Governance: Model Pengembangan Ekowisata di Desa Siangan. *Postgraduated Community Service Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/pcsj.2.1.2021.10-15>